

Multinational Tax Planning: Foreign Tax Credit Limitations And Income Shifting

Belandina Anita Sere Sihombing¹, Mareta Putri², Luk Luk Fuadah³

Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

Penulis Korespondensi: 01042682428011@student.unsri.ac.id²
01042682428007@student.unsri.ac.id¹, lukluk_fuadah@unsri.ac.id³

Article Information:

Received: 15 April 2025, Accepted: 28 April 2025, Published: 04 Mei 2025

Abstract

This study analyses the influence of Foreign Tax Credit (FTC) Limitations and Income Shifting on the taxation strategies of multinational companies using the Systematic Literature Review (SLR) method. This study categorises findings from 20 scientific articles into three main groups: research supporting the significant influence of FTC Limitations and Income Shifting on tax strategies, research finding no strong relationship between the two, and research identifying other factors contributing to multinational companies' tax planning. The results indicate that FTC Limitations encourage companies to use Income Shifting strategies to reduce their global tax liabilities. Practices such as transfer pricing, thin capitalisation, and the use of tax havens are often used to optimise tax payments. However, some studies indicate that domestic tax policies, corporate ownership structures, and international accounting standards also play an important role in corporate tax decisions. In addition, the lack of coordination in tax policies between countries creates loopholes that allow companies to exploit tax arbitrage.

Kata Kunci: Foreign Tax Credit Limitations, Income Shifting, Transfer Pricing, Perencanaan Pajak, Perusahaan Multinasional

JEL Codes: F23, H24, H26

1. Pendahuluan

Perencanaan pajak perusahaan multinasional telah menjadi fokus utama dalam studi ekonomi dan kebijakan perpajakan internasional. Perusahaan multinasional memiliki fleksibilitas untuk memanfaatkan perbedaan kebijakan perpajakan di berbagai negara guna mengoptimalkan kewajiban pajaknya. Salah satu strategi utama yang digunakan adalah income shifting, yaitu pemindahan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah untuk mengurangi beban pajak efektif ([Dharmapala & Riedel, 2012](#)). Selain itu, perusahaan juga menggunakan Foreign Tax Credit (FTC) sebagai mekanisme untuk mengimbangi pajak yang telah dibayarkan di luar negeri terhadap pajak domestik mereka. Namun, adanya batasan FTC sering kali menjadi tantangan bagi perusahaan dalam mengoptimalkan strategi pajaknya ([Dowd et al., 2017](#)).

Dalam literatur ekonomi pajak, terdapat berbagai pendekatan yang menyoroiti dampak dari income shifting dan batasan FTC terhadap sistem perpajakan global. Studi oleh ([Fuest et al., 2022](#)) menunjukkan bahwa sekitar 40% dari laba perusahaan multinasional yang dilaporkan di tax havens merupakan hasil dari pemindahan laba, yang menyebabkan kehilangan pajak tahunan yang signifikan bagi negara-negara dengan tarif pajak tinggi. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh ([Beer & Loeprick, 2015](#)) mengidentifikasi bahwa perusahaan minyak dan gas sering kali memanfaatkan transfer pricing serta perbedaan tarif pajak domestik untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak internasional harus dirancang secara hati-hati untuk mengurangi potensi erosi basis pajak akibat praktik-praktik perencanaan pajak yang agresif.

Sejumlah studi juga menyoroiti peran regulasi pajak dalam membatasi praktik income shifting dan mengoptimalkan implementasi Foreign Tax Credit. ([Cooper & Nguyen, 2019](#)) dalam studi mereka di Journal of World Business menemukan bahwa perusahaan multinasional AS mengadopsi berbagai pendekatan dalam perencanaan pajaknya, tergantung pada kombinasi motivasi internal dan peluang yang tersedia dalam regulasi perpajakan internasional. Selain itu, penelitian oleh ([De Simone, 2013](#)) menyoroiti bagaimana standar akuntansi internasional, seperti International Financial Reporting Standards (IFRS), dapat meningkatkan transparansi dalam praktik perpajakan perusahaan multinasional, tetapi juga dapat membuka celah untuk strategi pemindahan laba yang lebih canggih. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan FTC harus dirancang untuk memastikan bahwa kredit pajak yang diberikan kepada perusahaan multinasional tidak secara tidak langsung mendorong praktik pemindahan laba yang tidak etis.

Dari perspektif kebijakan, berbagai negara telah mencoba mengimplementasikan langkah-langkah untuk membatasi praktik penghindaran pajak melalui kebijakan FTC yang lebih ketat serta pengawasan terhadap praktik transfer pricing. Studi oleh ([Hong & Smart, 2010](#)) menekankan bahwa tax havens tetap menjadi elemen utama dalam struktur perencanaan pajak perusahaan multinasional, dan bahwa kebijakan pajak yang tidak konsisten antar negara dapat meningkatkan insentif bagi perusahaan untuk memanfaatkan perbedaan kebijakan tersebut. Penelitian oleh Tim ([Dowd et al., 2017](#)) dalam Journal of Public Economics juga menunjukkan bahwa elastisitas laba terhadap pajak cenderung lebih besar di yurisdiksi pajak rendah, yang mengindikasikan bahwa perusahaan secara aktif menyesuaikan strategi mereka berdasarkan insentif perpajakan yang tersedia.

Selain itu, dampak dari pembatasan FTC terhadap strategi pajak juga telah dikaji dalam studi-studi yang lebih berfokus pada peran regulasi perpajakan internasional dalam mengurangi praktik penghindaran pajak. ([Sikka & Willmott, 2010](#)) dalam Critical Perspectives on Accounting membahas bagaimana transfer pricing digunakan oleh perusahaan multinasional untuk menghindari pajak dan mempertahankan kekayaan, sering kali mengarah pada ketidakadilan sosial dan ekonomi. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa reformasi kebijakan pajak harus mempertimbangkan tidak hanya efisiensi pajak, tetapi juga dampak distribusionalnya terhadap perekonomian global.

Dalam regulasi perpajakan yang semakin ketat, perusahaan multinasional juga menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kepatuhan terhadap regulasi dengan strategi optimalisasi pajaknya. Studi oleh ([Fuest et al., 2022](#)) mengungkapkan bahwa adanya kebijakan anti-avoidance dan peningkatan transparansi pajak telah mengurangi efektivitas beberapa strategi income shifting, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasi kebijakan yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak yang lebih holistik dan berbasis data

diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan pajak tidak hanya membatasi penghindaran pajak, tetapi juga mendorong kepatuhan yang lebih baik dari perusahaan multinasional.

2. Tinjauan Literature

Agency Theory (Teori Keagenan)

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajer (agen) yang memiliki kepentingan yang berbeda. Pemilik perusahaan menginginkan peningkatan nilai perusahaan dan keuntungan jangka panjang, sementara manajer dapat memiliki tujuan pribadi yang berbeda, seperti memperoleh insentif atau mempertahankan kendali atas sumber daya perusahaan ([Jensen & Meckling, 1976](#)). Konflik kepentingan ini dapat memunculkan permasalahan keagenan, di mana manajer mengambil keputusan yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemilik.

Menurut ([Eisenhardt, 1989](#)), teori keagenan berfokus pada mekanisme kontrak dan pengawasan sebagai cara untuk mengurangi konflik kepentingan. Penggunaan tata kelola perusahaan yang efektif, seperti struktur kepemilikan yang transparan dan pemberian insentif berbasis kinerja, menjadi strategi utama dalam mengatasi masalah keagenan.

Pemilik modal *pinsipal* yaitu pemerintah yang memungut dan menetapkan kebijakan perpajakan dan manajemen *agen* yaitu wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perpajakan berperan penting dalam hal ini, karena kebijakan pajak dapat mempengaruhi insentif bagi kedua pihak dalam pengambilan keputusan. Misalnya, pajak yang tinggi dapat mengurangi keuntungan bersih yang diterima oleh pemilik modal, sehingga mereka mungkin lebih enggan untuk berinvestasi dalam IJV ([Edwards & Todtenhaupt, 2020](#)). Selain itu, pajak yang berbeda di negara asal dan negara tujuan dapat menciptakan ketidakpastian yang lebih besar ([Wild et al., 2023](#)).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk mengumpulkan dan menganalisis penelitian terdahulu yang relevan dengan topik Multinational Tax Planning: Foreign Tax Credit Limitations and Income Shifting. Sebanyak 20 jurnal ilmiah yang relevan akan dikaji secara sistematis. Jurnal-jurnal tersebut diperoleh dari database akademik seperti Scopus, ScienceDirect, ResearchGate, dan Google Scholar dengan kriteria inklusi berupa jurnal yang membahas perencanaan pajak perusahaan multinasional dalam konteks foreign tax credit limitations dan income shifting, diterbitkan dalam rentang waktu 2005 - 2023, serta memiliki metodologi yang jelas dengan kata kunci “foreign tax credit limitations”, “income shifting strategies”, dan “multinational tax planning”.

Setelah dilakukan kajian literatur, jurnal-jurnal tersebut akan dikategorikan berdasarkan hasil temuan mereka, yaitu apakah menyatakan adanya pengaruh batasan foreign tax credit terhadap strategi perencanaan pajak multinasional atau tidak. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif untuk melihat pola yang muncul dan menentukan proporsi jurnal yang mendukung atau tidak mendukung hipotesis penelitian. Kesimpulan akhir akan dibuat berdasarkan temuan mayoritas serta mempertimbangkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perbedaan hasil penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

Tabel 1 Sumber Jurnal dan Artikel

No	Indeks Akreditasi	Jumlah Artikel
1	Scopus Q1	15
2	Scopus Q2	1
3	Scopus Q3	3
4	Scopus Q4	1
Total	-	20

Tabel 1 menyajikan data mengenai sumber jurnal dan jumlah artikel yang terindeks dalam berbagai kategori kualitas akademik. Dari hasil Systematic Literature Review (SLR) yang dilakukan, ditemukan bahwa mayoritas artikel yang dikaji berasal dari jurnal Scopus Q1 dengan jumlah 15 artikel. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian yang dianalisis memiliki standar akademik yang tinggi dan telah melalui proses review yang ketat. Selain itu, terdapat 3 artikel yang berasal dari jurnal Scopus Q3, serta masing-masing 1 artikel dari Scopus Q2 dan Scopus Q4.

Distribusi artikel ini mencerminkan bahwa penelitian ini mengacu pada sumber-sumber yang memiliki kredibilitas dalam bidang perpajakan internasional, perencanaan pajak multinasional, dan kebijakan fiskal global. Artikel-artikel tersebut berasal dari berbagai jurnal ekonomi, akuntansi, dan keuangan yang berfokus pada Multinational Tax Planning, Foreign Tax Credit Limitations, Income Shifting, Transfer Pricing, serta aspek kebijakan perpajakan terkait.

Selain berasal dari jurnal dengan indeks tinggi, artikel yang dikaji dalam penelitian ini juga memiliki metodologi yang beragam, mencakup penelitian kuantitatif, kualitatif, serta tinjauan literatur. Analisis terhadap artikel-artikel ini dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi pola temuan, tren kebijakan perpajakan, serta implikasi terhadap strategi perencanaan pajak perusahaan multinasional.

Tabel 2 Negara Penelitian

No	Negara	Jumlah Artikel
1	Eropa	3
2	Amerika Serikat	4
3	Internasional	2
4	Indonesia	1
5	Ghana	1
6	India	1
7	Sub-Sahara Afrika	1
8	Malaysia	2
9	Kanada	1
10	Jerman	2
11	Indonesia & Malaysia	1
12	Inggris	1
Total	-	20

Tabel 2 menunjukkan distribusi 20 artikel ilmiah yang dikaji dalam penelitian ini berdasarkan negara tempat penelitian dilakukan. Amerika Serikat memiliki jumlah artikel terbanyak dengan 4 artikel, diikuti oleh Eropa dengan 3 artikel, serta penelitian di tingkat internasional dengan 2

artikel. Beberapa negara lain yang juga menjadi fokus dalam penelitian perpajakan internasional ini adalah Indonesia, Malaysia, Jerman, Inggris, Ghana, India, dan Sub-Sahara Afrika. Distribusi ini menunjukkan bahwa penelitian dalam bidang Multinational Tax Planning, Foreign Tax Credit Limitations, dan Income Shifting masih banyak dilakukan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Jerman, sementara negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, dan Ghana juga mulai mendapatkan perhatian dalam konteks kebijakan perpajakan internasional.

Tabel 3 Metode Penelitian

No	Metode Penelitian	Jumlah Artikel
1	Kuantitatif	13
2	Kualitatif	3
3	Literature Review	4
Total	-	20

Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 20 artikel yang dianalisis dalam penelitian ini, mayoritas menggunakan metode kuantitatif dengan jumlah 13 artikel. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian dalam bidang Multinational Tax Planning, Foreign Tax Credit Limitations, dan Income Shifting menggunakan data empiris dan teknik statistik untuk menganalisis dampak kebijakan perpajakan terhadap perusahaan multinasional. Selain itu, terdapat 3 artikel yang menggunakan metode kualitatif, yang lebih berfokus pada eksplorasi mendalam mengenai strategi perpajakan perusahaan dan perspektif regulator terhadap kebijakan pajak. Sementara itu, 4 artikel berbasis Literature Review, yang mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasi tren, kesenjangan penelitian, serta pengaruh regulasi perpajakan terhadap perusahaan multinasional. Temuan ini menunjukkan bahwa kajian dalam bidang perpajakan internasional dan strategi pajak perusahaan multinasional masih didominasi oleh metode kuantitatif, meskipun pendekatan kualitatif dan literature review tetap berperan dalam memberikan perspektif mendalam terhadap teori dan implementasi kebijakan perpajakan global.

Tabel 4 Hasil Penelitian

No	Hasil Penelitian	Peneliti
1	Mendukung adanya pengaruh Foreign Tax Credit Limitations dan Income Shifting terhadap perencanaan pajak perusahaan multinasional	(Medioli et al., 2023), (Olibe & Razaee, 2008), (Ftouhi & Ghardallou, 2020), (Amidu et al., 2019), (Hong & Smart, 2010), (De Simone, 2013), (Dharmapala & Riedel, 2012), (Fuest et al., 2022), (Dowd et al., 2017), (Merz & Overesch, 2016)
2	Tidak mendukung adanya pengaruh Foreign Tax Credit Limitations dan Income Shifting terhadap perencanaan pajak perusahaan multinasional	(Jalan & Vaidyanathan, 2017), (Otusanya et al., 2023), (Cooper & Nguyen, 2019), (Beer & Loeprick, 2015), (Mushtaq et al., 2020)
3	Mengidentifikasi faktor lain yang berkontribusi dalam strategi perpajakan	(Cheong et al., 2020), (Masri et al., 2019), (Sikka & Willmott, 2010), (Muhammadi et al., 2016), (De Simone, 2013)

No	Hasil Penelitian	Peneliti
	multinasional	
Total	-	20

Tabel 4 menyajikan hasil penelitian dari 20 artikel yang telah dikaji dalam Systematic Literature Review (SLR). Artikel-artikel ini dikategorikan berdasarkan temuan utama mereka terkait Foreign Tax Credit Limitations dan Income Shifting dalam strategi perpajakan perusahaan multinasional.

1. Sebanyak 10 artikel mendukung adanya pengaruh signifikan Foreign Tax Credit Limitations dan Income Shifting terhadap strategi perpajakan perusahaan multinasional.
2. Sebanyak 5 artikel tidak menemukan hubungan yang kuat antara kebijakan FTC dan praktik income shifting, menunjukkan bahwa faktor lain seperti regulasi domestik dan insentif pajak lebih dominan dalam strategi perpajakan perusahaan.
3. Sebanyak 5 artikel mengidentifikasi faktor lain yang turut berkontribusi dalam strategi perpajakan multinasional, seperti transparansi kebijakan pajak, efektivitas pengawasan pajak, serta dinamika ekonomi global yang mempengaruhi keputusan pajak perusahaan multinasional.

4.2. Pembahasan

Pengaruh Signifikan Foreign Tax Credit Limitations dan Income Shifting terhadap Strategi Perpajakan Perusahaan Multinasional

Penelitian ini menunjukkan bahwa Foreign Tax Credit (FTC) Limitations dan Income Shifting memiliki dampak yang signifikan terhadap strategi perpajakan perusahaan multinasional. Sejumlah penelitian yang dikaji dalam studi ini, seperti yang dilakukan oleh [Amidu et al., \(2019\)](#); [De Simone, \(2013\)](#); [Dharmapala & Riedel, \(2012\)](#); [Dowd et al., \(2017\)](#); [Ftouhi & Ghardallou, \(2020\)](#); [Fuest et al., \(2022\)](#); [Hong & Smart, \(2010\)](#); [Medioli et al., \(2023\)](#); [Merz & Overesch, \(2016\)](#); [Olibe & Razaee, \(2008\)](#) menunjukkan bahwa keterbatasan dalam mekanisme kredit pajak asing memiliki pengaruh yang nyata terhadap keputusan perpajakan yang dibuat oleh perusahaan multinasional.

Foreign Tax Credit Limitations merupakan kebijakan yang diterapkan oleh berbagai negara untuk mengontrol sejauh mana perusahaan dapat mengklaim kredit pajak atas pajak yang telah dibayarkan di luar negeri. Studi oleh ([Medioli et al., 2023](#)) mengungkapkan bahwa pembatasan ini mendorong perusahaan multinasional untuk mencari alternatif dalam mengurangi beban pajak mereka, seperti dengan meningkatkan aktivitas income shifting ke yurisdiksi pajak rendah. Dengan demikian, perusahaan multinasional secara aktif merancang strategi pajak yang kompleks guna mengoptimalkan pengurangan kewajiban pajak mereka

([Olibe & Razaee, 2008](#)) menemukan bahwa batasan pada kredit pajak asing memperkuat insentif bagi perusahaan untuk menggunakan transfer pricing dalam transaksi lintas batas. Dengan memanfaatkan struktur biaya antar perusahaan dalam satu grup, perusahaan dapat mengalihkan keuntungan mereka ke negara-negara dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga mengurangi kewajiban pajak mereka secara keseluruhan. Penelitian ([Ftouhi & Ghardallou, 2020](#)) mengonfirmasi temuan ini dengan menunjukkan bahwa perusahaan yang beroperasi di beberapa yurisdiksi cenderung mengalokasikan laba ke negara-negara dengan sistem perpajakan yang lebih menguntungkan. Hal ini tidak hanya mengurangi pajak yang harus dibayarkan, tetapi juga meningkatkan daya saing perusahaan di tingkat global.

Studi yang dilakukan oleh ([Amidu et al., 2019](#)) menunjukkan bahwa perusahaan multinasional yang beroperasi di negara berkembang, seperti Ghana, menggunakan kombinasi strategi transfer pricing dan income shifting untuk menghindari pajak yang tinggi. Praktik ini berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan pajak bagi pemerintah negara asal, yang pada akhirnya mempengaruhi kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan negara. ([Hong & Smart, 2010](#)) menyoroti bahwa perusahaan multinasional menghadapi dilema dalam merancang strategi pajak mereka akibat adanya FTC Limitations. Jika suatu negara menerapkan pembatasan yang ketat terhadap kredit pajak asing, perusahaan cenderung lebih agresif dalam memanfaatkan transfer pricing dan metode lainnya untuk mengurangi pajak global mereka.

([De Simone, 2013](#)) menemukan bahwa dengan adanya standar akuntansi internasional yang lebih fleksibel, perusahaan dapat lebih mudah melakukan manipulasi harga transfer dan memilih yurisdiksi yang lebih menguntungkan. Regulasi yang diterapkan dalam penghitungan pajak multinasional sangat menentukan sejauh mana perusahaan dapat mengoptimalkan pajaknya. Hal ini diperkuat oleh studi ([Dharmapala & Riedel, 2012](#)) yang menunjukkan bahwa FTC Limitations memiliki efek yang kompleks terhadap insentif perpajakan perusahaan. Pembatasan yang terlalu ketat dapat memotivasi perusahaan untuk mencari celah dalam regulasi pajak global, sementara regulasi yang lebih fleksibel dapat meningkatkan persaingan pajak antar negara.

([Fuest et al., 2022](#)) menyoroti bagaimana pemindahan laba ke tax havens telah berkontribusi terhadap erosi basis pajak negara-negara maju. Dengan adanya batasan FTC, perusahaan multinasional lebih cenderung menggunakan skema agresif seperti thin capitalization dan hybrid mismatch arrangements untuk tetap mendapatkan manfaat dari struktur perpajakan global. Sementara itu, ([Dowd et al., 2017](#)) menekankan perlunya koordinasi kebijakan perpajakan internasional untuk mencegah eksploitasi sistem pajak melalui income shifting. Tanpa koordinasi yang lebih baik, perusahaan multinasional akan terus mencari cara untuk menghindari pajak dengan mengoptimalkan struktur perusahaannya.

Kebijakan FTC dan Praktik Income Shifting

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Foreign Tax Credit (FTC) Limitations tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap strategi perpajakan perusahaan multinasional. Studi yang dilakukan oleh ([Jalan & Vaidyanathan, 2017](#)), ([Otusanya et al., 2023](#)), ([Cooper & Nguyen, 2019](#)), ([Beer & Loepnick, 2015](#)) serta ([Mushtaq et al., 2020](#)) menyoroti bahwa faktor lain seperti regulasi domestik, struktur kepemilikan perusahaan, dan insentif pajak lebih memengaruhi keputusan perusahaan dalam perencanaan pajak internasional.

Efektivitas kebijakan FTC Limitations sangat bergantung pada karakteristik sistem perpajakan domestik di masing-masing negara. ([Jalan & Vaidyanathan, 2017](#)) menemukan bahwa negara-negara yang memiliki sistem perpajakan fleksibel dengan berbagai insentif pajak bagi perusahaan multinasional cenderung tidak terdampak oleh pembatasan FTC. Dalam kondisi ini, perusahaan lebih memilih strategi domestik yang menguntungkan daripada memanfaatkan income shifting sebagai upaya mengurangi beban pajak. Penelitian ini mengindikasikan bahwa FTC Limitations tidak selalu menjadi faktor utama dalam perencanaan pajak perusahaan multinasional.

Regulasi perpajakan yang lemah di negara asal perusahaan juga menjadi faktor yang lebih dominan dalam memengaruhi praktik perpajakan perusahaan multinasional dibandingkan

dengan batasan FTC. ([Otusanya et al., 2023](#)) menunjukkan bahwa perusahaan multinasional yang beroperasi di negara-negara dengan pengawasan pajak yang lemah cenderung lebih mudah mengeksploitasi celah hukum untuk menghindari pajak. Dengan demikian, keberadaan FTC Limitations tidak efektif jika regulasi domestik tidak memiliki mekanisme yang kuat untuk memastikan kepatuhan pajak perusahaan.

Faktor lain yang memengaruhi strategi perpajakan perusahaan multinasional adalah struktur kepemilikan perusahaan dan kebijakan pajak domestik. ([Cooper & Nguyen, 2019](#)) menekankan bahwa perusahaan dengan struktur kepemilikan yang kompleks lebih cenderung menggunakan metode transfer pricing dan thin capitalization bukan karena batasan FTC, tetapi lebih karena insentif fiskal yang tersedia di yurisdiksi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan domestik suatu negara dapat memberikan dampak lebih besar terhadap keputusan perpajakan dibandingkan dengan regulasi FTC Limitations yang diterapkan secara internasional.

Penelitian yang dilakukan oleh ([Beer & Loepnick, 2015](#)) juga mendukung temuan ini dengan menyoroti bahwa FTC Limitations tidak selalu efektif dalam mencegah tax avoidance karena banyak perusahaan multinasional yang mengalihkan keuntungan mereka ke tax havens yang tidak terpengaruh oleh kebijakan FTC. Mereka menemukan bahwa perusahaan yang bergerak dalam industri minyak dan gas lebih cenderung menggunakan skema perpajakan berbasis repatriasi keuntungan yang tidak terkait dengan kebijakan FTC Limitations. Dengan demikian, kebijakan ini tidak dapat dijadikan satu-satunya instrumen untuk mengendalikan praktik income shifting.

([Mushtaq et al., 2020](#)) lebih lanjut menekankan bahwa pajak repatriasi dan kebijakan insentif di negara asal perusahaan lebih memengaruhi arus modal dan distribusi keuntungan dibandingkan dengan kebijakan FTC Limitations. Mereka menemukan bahwa negara-negara tertentu lebih memilih untuk memberikan insentif pajak domestik guna menarik investasi dibandingkan dengan menerapkan FTC Limitations yang lebih ketat. Dalam hal ini, beberapa perusahaan bahkan memilih untuk tidak melakukan income shifting karena manfaat yang diperoleh dari kebijakan domestik lebih besar dibandingkan dengan risiko penghindaran pajak yang dapat mengundang audit atau sanksi perpajakan dari otoritas pajak.

Temuan dari penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa FTC Limitations bukan satu-satunya faktor yang menentukan strategi perpajakan perusahaan multinasional. Kebijakan fiskal domestik, regulasi kepemilikan perusahaan, dan insentif pajak lebih memainkan peran dalam keputusan pajak perusahaan global. ([Beer & Loepnick, 2015](#)) menekankan bahwa koordinasi kebijakan perpajakan global lebih diperlukan dibandingkan dengan pembatasan FTC. Mereka mengusulkan adanya standar perpajakan internasional yang lebih beragam untuk mencegah eksploitasi celah pajak yang tidak hanya bergantung pada satu kebijakan seperti FTC Limitations. ([Jalan & Vaidyanathan, 2017](#)) menekankan bahwa perbaikan kebijakan FTC sebaiknya dilakukan melalui mekanisme pengawasan lintas negara untuk memastikan bahwa batasan ini tetap relevan dalam menghadapi tantangan pajak global.

Faktor Lain yang Turut Berkontribusi dalam Strategi Perpajakan Multinasional

Selain Foreign Tax Credit (FTC) Limitations dan Income Shifting, terdapat faktor lain yang turut memengaruhi strategi perpajakan perusahaan multinasional. Berbagai studi telah mengidentifikasi bahwa kebijakan perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme FTC, tetapi juga oleh faktor seperti kebijakan fiskal domestik, struktur ekonomi, regulasi akuntansi, dan tekanan politik. ([Cheong et al., 2020](#)), ([Masri et al., 2019](#)), ([Sikka & Willmott, 2010](#)),

([Muhammadi et al., 2016](#)), serta ([De Simone, 2013](#)) menyoroti bagaimana elemen-elemen ini berkontribusi dalam pembentukan strategi perpajakan yang kompleks di tingkat global.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh ([Cheong et al., 2020](#)), ditemukan bahwa akses terhadap kredit dan struktur pajak di masing-masing negara memiliki dampak yang signifikan terhadap strategi perpajakan perusahaan multinasional. Perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan dengan akses kredit terbatas cenderung mencari cara untuk mengoptimalkan pengurangan pajak guna mengimbangi keterbatasan modal yang tersedia. Struktur pajak yang tidak mendukung juga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih agresif, termasuk melalui penggunaan tax havens dan metode transfer pricing.

Studi yang dilakukan oleh ([Masri et al., 2019](#)) menyoroti bahwa manajemen risiko pajak menjadi salah satu faktor utama dalam strategi perpajakan internasional. Perusahaan multinasional semakin menyadari pentingnya kepatuhan pajak dan transparansi, yang menyebabkan mereka mengadopsi pendekatan strategis dalam mengelola risiko pajak mereka. Praktik seperti thin capitalization dan hybrid mismatch arrangements digunakan untuk mengoptimalkan struktur perpajakan tanpa secara langsung melanggar regulasi yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa strategi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh bagaimana perusahaan mengelola risiko dalam lingkungan perpajakan yang terus berubah.

([Sikka & Willmott, 2010](#)) mengemukakan bahwa dimensi sosial dan politik turut berperan dalam perencanaan pajak perusahaan multinasional. Perusahaan sering kali dihadapkan pada tekanan dari pemerintah, organisasi internasional, serta masyarakat sipil untuk lebih transparan dalam praktik perpajakannya. Dalam beberapa kasus, perusahaan multinasional mengadopsi kebijakan perpajakan yang lebih konservatif guna mempertahankan reputasi dan menghindari dampak negatif dari citra publik yang buruk. Studi ini menegaskan bahwa strategi perpajakan tidak semata-mata didasarkan pada insentif ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan politik yang lebih luas.

([Muhammadi et al., 2016](#)) menemukan bahwa regulasi akuntansi internasional juga berperan dalam membentuk strategi perpajakan perusahaan multinasional. Standar pelaporan keuangan yang lebih transparan dan ketat, seperti International Financial Reporting Standards (IFRS), berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pajak serta menekan praktik penghindaran pajak yang agresif. Namun, penelitian ini juga mengungkap bahwa perbedaan dalam penerapan standar akuntansi di berbagai negara dapat menciptakan peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan arbitrase regulasi demi keuntungan pajak.

([De Simone, 2013](#)) menyoroti bagaimana kebijakan fiskal domestik berpengaruh terhadap keputusan perpajakan perusahaan multinasional. Negara yang memiliki kebijakan fiskal pro-bisnis dengan tingkat pajak yang lebih rendah cenderung menarik lebih banyak investasi asing, sementara negara dengan kebijakan pajak yang lebih ketat dapat menghadapi tantangan dalam mempertahankan basis pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa strategi perpajakan multinasional sangat bergantung pada keseimbangan antara daya saing ekonomi suatu negara dan efektivitas kebijakan perpajakannya.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis pengaruh Foreign Tax Credit (FTC) Limitations dan Income Shifting terhadap strategi perpajakan perusahaan multinasional dengan menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Berdasarkan hasil tinjauan terhadap 20

artikel ilmiah, ditemukan bahwa terdapat tiga kategori utama dalam temuan penelitian ini. Sebagian besar penelitian mendukung adanya pengaruh signifikan FTC Limitations dan Income Shifting terhadap strategi perpajakan perusahaan multinasional, sementara beberapa penelitian tidak menemukan hubungan yang kuat antara keduanya, dan sebagian lainnya mengidentifikasi faktor-faktor lain yang turut memengaruhi kebijakan perpajakan global.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa FTC Limitations dapat mendorong perusahaan multinasional untuk mengoptimalkan strategi perpajakan mereka melalui praktik Income Shifting. Beberapa perusahaan memilih untuk mengalihkan keuntungan mereka ke yurisdiksi dengan pajak lebih rendah guna mengurangi kewajiban pajak global mereka. Praktik seperti transfer pricing, thin capitalization, dan penggunaan tax havens sering kali digunakan sebagai bagian dari perencanaan pajak yang agresif. Dengan adanya FTC Limitations, perusahaan multinasional semakin terdorong untuk mencari celah dalam regulasi perpajakan internasional guna memaksimalkan keuntungan mereka.

Namun, beberapa penelitian berpendapat bahwa FTC Limitations tidak selalu menjadi faktor utama yang memengaruhi strategi perpajakan perusahaan multinasional. Faktor-faktor lain seperti regulasi perpajakan domestik, struktur kepemilikan perusahaan, standar akuntansi internasional, serta tekanan sosial dan politik juga turut berkontribusi dalam menentukan kebijakan pajak perusahaan multinasional. Dalam beberapa kasus, regulasi pajak domestik yang lebih fleksibel dan insentif fiskal yang diberikan oleh negara asal dapat lebih berpengaruh dibandingkan dengan kebijakan FTC Limitations.

Selain itu, temuan penelitian juga menyoroti bahwa transparansi dan koordinasi kebijakan perpajakan antarnegara sangat diperlukan untuk mencegah eksploitasi sistem perpajakan oleh perusahaan multinasional. Ketidakseimbangan regulasi di berbagai negara menciptakan celah yang memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan arbitrase pajak. Oleh karena itu, upaya harmonisasi kebijakan pajak internasional perlu diperkuat guna menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Amidu, M., Coffie, & W., Acquah, P. (2019). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 235–259. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>
- Beer, S., & Loeprick, J. (2015). Taxing Income in the Oil and Gas Sector - Challenges of International and Domestic Profit Shifting. *SSRN Electronic Journal*, 2015. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2610558>
- Cheong, C., Lee, M., Weissmann, M. A. (2020). Credit access, tax structure and the performance of Malaysian manufacturing SMEs. *International Journal of Managerial Finance*, 16(4), 433–454. <https://doi.org/10.1108/IJMF-08-2019-0308>
- Cooper, M., & Nguyen, Q. T. K. (2019). Understanding the interaction of motivation and opportunity for tax planning inside US multinationals: A qualitative study. *Journal of World Business*, 54(6). <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2019.101023>
- De Simone, L. (2013). Does a common set of accounting standards affect tax-motivated income shifting for multinational firms? *Journal of Accounting and Economics*, 61(1), 145–165. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.06.002>
- Dharmapala, D., & Riedel, N. (2012). *Earnings Shocks and Tax-Motivated Income-Shifting* :

- Evidence from European Multinationals Dhammika Dharmapala Earnings Shocks and Tax-Motivated Income- Shifting : Evidence from European Multinationals Abstract.* <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2012.08.004>
- Dowd, T., Landefeld, & P., Moore, A. (2017). Profit shifting of U.S. multinationals. *Journal of Public Economics*, 148(January 2016), 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2017.02.005>
- Edwards, A., & Todtenhaupt, M. (2020). Capital gains taxation and funding for start-ups. *Journal of Financial Economics*, 138(2), 549–571. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2020.06.009>
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory : An Assessment and Review. *Agency Theory : An Assessment and Review*, 14(1)(1), 57–74. <https://www.jstor.org/stable/258191>
- Ftouhi, K., & Ghardallou, W. (2020). International tax planning techniques: a review of the literature. *Journal of Applied Accounting Research*, 21(2), 329–343. <https://doi.org/10.1108/JAAR-05-2019-0080>
- Fuest, C., Hugger, F., & Neumeier, F. (2022). Corporate profit shifting and the role of tax havens: Evidence from German country-by-country reporting data. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 194(January), 454–477. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.11.016>
- Hong, Q., & Smart, M. (2010). In praise of tax havens: International tax planning and foreign direct investment. *European Economic Review*, 54(1), 82–95. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2009.06.006>
- Jalan, A., & Vaidyanathan, R. (2017). Tax havens: conduits for corporate tax malfeasance. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 25(1), 86–104. <https://doi.org/10.1108/JFRC-04-2016-0039>
- Jensen, C. M., & Meckling, H. W. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1057/9781137341280.0038>
- Masri, I., Syakhroza, A., & Samingun. (2019). The role of tax risk management in international tax avoidance practices: Evidence from Indonesia and Malaysia. *International Journal of Trade and Global Markets*, 12(3–4), 311–322. <https://doi.org/10.1504/IJTGM.2019.101561>
- Medioli, A., Azzali, S., Mazza, T. (2023). High ownership concentration and income shifting in multinational groups. *Management Research Review*, 46(1), 82–99. <https://doi.org/10.1108/MRR-02-2021-0141>
- Merz, J., & Overesch, M. (2016). Profit shifting and tax response of multinational banks. *Journal of Banking and Finance*, 68(0), 57–68. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2016.03.015>
- Muhammadi, A., Ahmed, Z., & Habib, A. (2016). Multinational transfer pricing of intangible assets: Indonesian tax auditors' perspectives. *Asian Review of Accounting*, 24(3), 313–337. <https://doi.org/10.1108/ARA-10-2014-0112>
- Mushtaq, M., Tahir, M., & Ibrahim, H. (2020). Impact of Repatriation Taxes and

- Earned/Contributed Capital Mix on Dividend Repatriation Policy: The Moderating Role of Firm Financial Maturity. *International Journal of Monetary Economics and Finance*, 13(2), 1. <https://doi.org/10.1504/ijmef.2020.10029684>
- Olibe, K. O., & Razaee, Z. (2008). Income Shifting and Corporate Taxation: the role of cross-border intrafirm transfers. *Review of Accounting and Finance*, 7(1), 83–101. <http://dx.doi.org/10.1108/14757700810853860>
- Otusanya, O. J & Lauwo, S. G. (2023). Tax Avoidance in Developing Countries: Evidence of MNCs in Sub-Saharan Africa. *Department of Accounting* 4(1), 1–23. https://pure.port.ac.uk/ws/portalfiles/portal/50755732/Tax_Avoidance_in_Developing_Countries_Evidence_from_MNCs_in_Sub_Saharan_Africa_Journal_of_Financial_Crim_es.pdf
- Sikka, P., & Willmott, H. (2010). The dark side of transfer pricing: Its role in tax avoidance and wealth retentiveness. *Critical Perspectives on Accounting*, 21(4), 342–356. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2010.02.004>
- Wild, J. J., Wild, J., & Wild, K. L. (2023). International joint ventures, shareholder returns, venture complexity, and political risk. *Journal of Corporate Accounting and Finance*, 34(2), 135–148. <https://doi.org/10.1002/jcaf.22600>

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

